

Kelas Menengah Perubahan

“Sebuah Kontestasi Stratifikasi Dominasi Dalam Kapitalisme dan Konsumerisme” (Dalam Perspektif Teori Sosio Historis Kritis C. Wright Mills)

Arie Wahyu Prananta

Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

Study and Discussion Middle Class in Indonesia Since the 1970's making us Startled and remind them a very central role in the class structure of the elite class and the lower class. Mengah class structure that is very dynamic and became the most influential class in the class structure Indonesian nation. The most influential class of bargaining structure makes it difficult to track class in the class structure of the Indonesian nation but their role is very important, and some of the events changes ranging from the collapse of the old order and the new order and the new order to the order of the reform to make the lesson for the nation that etintas and their role is to make the power of change in the state system and social structure in the community. Vagueness figure mengah class in the social structure in the community make this a decent middle-class researched and chosen as a topic there does require quite a lot of study and also an imagination in soziologi to be in perspektifkan and projected in an empirical object assumes constructed reality of objects material to be appointed as a more macro assumptions preposition. The existence of vague mengah class does not mean the absence of middle class structures etintas them, the emergence of class roles mengah be a force of change in a country makes them very central role, classification and categorization within a social structure in the community is very vague, so the need to study very deep study and empirically focused on middle-class structure, Refine concepts in a theory of the middle class by Ariel Hariyanto in a study Robinson is the middle class are some government officials, practitioners, managers in a company fund or class of educated intellectual, in the structure existing social Indonesian nation. Capitalism here as in imagine a production order in the capital penguasaan. The need for this level of precision and mapping of capitalism in the frame in the ownership of capital

Keyword: Middle Class, Etintas, Capitalism, Sociological Imagination

Latar Belakang Masalah

Struktur Kelas Mengah yang memang sangat dinamis dan menjadi kelas yang paling berpengaruh dalam struktur kelas bangsa Indonesia¹. Namun Demikian, Studi yang Mengkaji tentang Kapitalisme, Peran dan Konsumerisme Kelas Menengah Mandiri yang berfokus pada ketidak radikalannya secara ekonomi dan ketidak konservatifannya secara sosial dan budaya, lebih jauh yang di kaji dalam penelitian adalah kelas menengah ini menjadi agen perubahan dalam startifikasi

sosial dalam sebuah dominasi kelas elit menjadi kajian paling menarik, dan memiliki tantangan tersendiri terutama di perkotaan yang sedang mengalami industrialisasi. Kelas menengah yang baru di harapkan menjadi kelas menengah yang paling berpengaruh. Keberadaan kelas menengah menjadikan posisi tawar struktur kelas ini sulit di lacak dalam struktur kelas Bangsa Indonesia tapi peran mereka sangat penting, dan beberapa peristiwa perubahan mulai dari runtuhnya orde lama dan orde baru, serta orde baru ke

orde reformasi menjadikan pelajaran bagi bangsa ini bahwa etintas dan peran mereka menjadikan kekuatan perubah dalam sistem kenegaraan dan struktur sosial dalam masyarakat. Kesamaran sosok kelas menengah dalam struktur sosial di masyarakat menjadikan kelas menengah ini layak diteliti dan dipilih sebagai topik yang sampai saat ini membutuhkan kajian cukup banyak dan juga suatu imaginasi yang akan di perspektifkan dan proyeksikan dalam suatu obyek empiris berangkat dari asumsi realitas dibangun dari objek material untuk diangkat menjadi asumsi preposisi yang lebih makro.

Keberadaan yang samar kelas menengah bukan berarti tidak adanya struktur kelas menengah etintas mereka, munculnya peran kelas menengah menjadi kekuatan perubah dalam sebuah Negara menjadikan peran mereka sangat sentral, klasifikasi dan penggolongan dalam sebuah struktur sosial dimasyarakat sangat samar, sehingga perlu studi yang sangat dalam studi yang fokus dan empirik tentang struktur kelas menengah ini¹

-
1. *Ariel Hariyanto dalam Buku Politik Kelas Menengah, Memperjelas sosok yang samar tentang struktur kelas menengah, 1989. Struktur Kelas Menengah dimana peran mereka sangat sentral walaupun dibutuhkan suatu imaginasi yang di wujudkan dalam suatu realitas kongkret, Pada umumnya kelas menengah yang di pahami komunitas lintas struktur dan kosmopolitan adalah kelompok yang sangat variatif dengan tempat bekerja mereka sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dalam suatu atmosfer perkotaan yang industrialistik. Atmosfer perkotaan dengan warna industrialistik membuat kelas menengah ini memiliki kesamaan selera mulai berdiskritsn, bersantap dan berlibur serta gaya hidup kosmopolitan, bahasa komunikasi yang di pakai. Setting Perkotaan dalam bingkai industrial atau post industrial yang terdiktomi akan di pilih setting wilayah fokus pada relitas post industrial. Alasan pemilihan post industrial disini memiliki alasan kajian post industrial tentang kelas menengah berkaitan dengan kepemilikan kapital Golongan menengah yang dimaksudkan di sini bukanlah golongan yang menjadi penggerak utama dalam tahap permulaan*

Studi dan Perbincangan Kelas Menengah di Indonesia Sejak Tahun 1970 an membuat Terperanjat serta mengingatkan pada peran mereka yang sangat sentral dalam struktur kelas antara dari kelas elit dan kelas bawah.

Karena era ini adalah era kelas menengah, pemahaman yang komprehensif tentang tindak tanduk kelompok ini amatlah penting, Pertambahan jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah di Indonesia dianggap sebagian kalangan belum bermutu. Partisipasi kelas ini dalam pembangunan tidak saja diharapkan melalui kegiatan konsumsi yang menggerakkan perekonomian. Akan tetapi, lebih jauh dari itu juga diharapkan berperan sebagai agen perubahan. Penajaman konsep dalam sebuah teori tentang kelas menengah oleh Ariel Hariyanto dalam sebuah studi Robinson yang dimaksud dengan kelas menengah adalah beberapa pejabat pemerintahan, para praktisi, Manajer dalam sebuah perusahaan dana, golongan terdidik atau intelektual, dalam struktur sosial yang ada di bangsa Indonesia. Kapitalisme disini seakan di bayangkan suatu tata produksi dalam penguasaan modal. Kebutuhan akan tingkat presisi dan pemetaan kapitalisme di bingkai dalam kepemilikan modal²

kapitalisme di Eropa Barat atau negara-negara industri pada saat ini, tetapi kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha dan pedagang pribumi, ahli hukum dan kelompok-kelompok

“Kelas Menengah dan Demokrasi Lapisan Menengah” (lihat Gatra, 4 Januari 1997), R. William Liddle, *“Kelas dan Demokratisasi”*, (lihat Gatra, 4 Januari 1997), Harold Crouch, *“Kelas Menengah dan Demokra- tisasi”* (lihat Gatra, 31 Mei 1997), Francois Raillon, *“Kelas Menengah dan Demokratisasi dari Bawah”* (lihat Forum Keadilan, Agustus 1995), Arif Budiman, *“Demokratisasi dan Keadaan Kelas Menengah Indonesia”* (lihat Forum Keadilan, April 1996), Rizal Mallarangeng, *“Kelas Menengah dan Demokratisasi”* (lihat Gatra, 4 Januari 1997), dan Ariel Heryanto, *“Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an”* dalam Gary Rodan (ed. 1996) yang bertajuk *“Indonesian Middle Class Oppositions in the 1990s”*.

Kajian tentang kelas menengah di Indonesia telah lama menarik perhatian para pakar.

Berbagai tulisan mereka tentang kelas menengah, diamati dari berbagai sisi. Sebagian dari tulisan para pakar itu, kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul, *“Kelas Menengah Bukan Ratu Adil”* (1999). Di dalam buku itu dimuat berbagai kajian teoretikal dan empirikal.

Beberapa tulisan yang mengungkap tentang teori kelas menengah antara lain berasal dari tulisan Ariel Heryanto (1993) tentang *“Kelas Menengah Yang Majemuk”*. Dalam tulisannya, Heryanto cenderung mempertahankan teori dikotomi dua kelas yang terbentuk oleh kesenjangan penguasaan atas alat-alat produksi. Artinya, hanya ada dua kelas dalam satu tata produksi: kelas yang dikuasai dan kelas yang menguasai. Tetapi dalam kebanyakan masyarakat mutakhir, dapat dikenali beberapa kelas atasan dan beberapa kelas bawah, masing-masing berasal dari tata produksi yang berbeda. Dalam tulisan Yuwono Sudarsono (1997) tentang *“Kelas Menengah dan Demokrasi Lapisan Menengah”*, beliau menyebutkan bahwa kelas menengah sebagai penggerak demokratisasi hanya berlaku sampai akhir

Abad ke 19. Kemajuan teknologi, perluasan perdagangan, berkembangnya industri pengangkutan dan jasa informasi telah lama meruntuhkan sendi-sendi teori perlunya kelas menengah. Kekuasaan baik yang bersumber dari harta, kepintaran otak maupun pemilikan atas tanah, bukannya semakin lebar, tetapi hanya dimiliki sekelompok orang saja.

Dalam tulisan Ariel Heryanto (1996) tentang *“Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an”*, diuraikan sejumlah kasus penyimpangan praktik demokratisasi sejak era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1965. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah, selalu meraih suara mayoritas (70%). Semua anggota parlemen, harus memperoleh kelulusan melalui, “penelitian khusus (*Litsus*)” yang sengaja dilakukan oleh pihak berkuasa sehingga keadaan ini tidak mungkin dilalui oleh kalangan oposisi. Para anggota parlemen boleh diberhentikan (*recall*) apabila ia bertentangan dengan rezim yang berkuasa.

Dalam tulisan A.E Priyono (1997) tentang kelas menengah dan konsumtivisme² “ Hasil laporan, *The*

5. Konsumtivisme Golongan menengah atas menurut adalah tingkatan sosial tertinggi

Jakarta Post (1998) menunjukkan bahwa mereka cenderung mengambil langkah-langkah penghematan sebagai upaya untuk mengurangi biaya sehingga mampu mempertahankan bisnis. Sejumlah orang dari kalangan menengah yang diwawancarai juga menunjukkan keengganan mereka untuk menikmati makanan dan minuman di gerai-gerai mewah karena harga yang berlaku sangat tinggi.

Sistem kapital di Indonesia merupakan legasi kolonialisme di Indonesia. Sistem ini pada mulanya berkembang di Eropa yang kemudian oleh dibawa ke Indonesia. Menurut Tan Malaka (2008 : 48), kapitalisme di Indonesia tidak dilahirkan oleh cara-cara produksi bumiputera yang menurut kemauan alam, ia adalah perkakas asing yang dipergunakan untuk kepentingan asing yang dengan kekerasan mendesak sistem

biasanya identik dengan kemewahan, banyak usaha sukses, beranja barang-barang mahal, sering bepergian ke luar negeri dan tidak ada permasalahan dengan namanya uang. Adapun kriteria penggolongan pengeluaran pada golongan ini berdasarkan stKritis kategorisasi Bank Dunia yaitu 10-20 dollar AS. Masyarakat yang termasuk golongan ini juga mendapat penghormatan atau dihormati oleh golongan di bawahnya karena beberapa keunggulan yang dimilikinya misalnya kedudukan sosial maupun kekayaannya. Contoh masyarakat golongan menengah atas seperti pengusaha, direktur, manajer, presiden, pejabat daerah, dan lain-lain. Kehidupan mereka jauh dari kata sengsara dan melarat dalam hal ekonomi. Namun, tak sedikit dari mereka tidak menikmati kebahagiaan meskipun memiliki harta yang melimpah.

produksi bumiputera. Dari pernyataan Tan Malaka ini dapat diketahui bahwa pada masa penjajahan struktur kapital di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial . Padahal, kapital yang ada di Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia, namun berhasil memengaruhi dan akhirnya menguasai kapital di Indonesia. VOC adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh pemerintah untuk menghindari persaingan dagang yang saat itu tengah marak di Benua Eropa. Selain itu, kongsi dagang ini juga bertujuan untuk melindungi perdagangan . VOC menjadi salah satu alat untuk mengeksploitasi Indonesia secara habis-habisan. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh VOC membuat perdagangan Indonesia yang saat itu masih berjaya, lama kelamaan mati karena semua usaha perdagangan dalam negeri dirugikan dan dibuat mati oleh VOC dan . Oost-Indische Compagnie adalah perusahaan dagang milik lain yang beroperasi di Indonesia saat itu. Sama seperti VOC, Oost-Indische Compagnie juga melakukan serangkaian tindakan untuk menghentikan perdagangan Indonesia, seperti rempah-rempah dengan bangsa lain selain agar mati dan dikuasai oleh . salah satu kebijakan Oost-Indische Compagnie adalah dengan memberlakukan sistem monopoli (Soekarno, 2001 : 38). Di awal penjajahan ini, dapat diketahui jika struktur kapital di Indonesia saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial yang bekerjasama dengan kongsi-kongsi dagang itu menguasai perdagangan di Indonesia.

Pada masa-masa berikutnya, tidak banyak perubahan terjadi di Indonesia. Struktur kapital masih diikuasai oleh pemerintah . Hal ini sejalan dengan paham dan konsep merkantilisme, sebuah paham dan konsep yang menjelaskan jika suatu negara ingin menjadi negara kaya dan

makmur, maka ia harus mengeksploitasi negara-negara lain (atau negara jajahannya). Perdagangan penduduk pribumi dengan bangsa asing selain lama kelamaan mati dan dialihkan pada pemerintah. Selanjutnya, bangsa Indonesia dieksploitasi secara habis-habisan lewat serangkaian kebijakan, seperti *cultuurstelsel*, pelayaran hongi, kerja rodi, dan sebagainya. Sebelum masuk zaman *cultuurstelsel*, Inggris pernah berkuasa di Indonesia, yang selanjutnya setelah 5 tahun berkuasa di Indonesia, atau sekritisr tahun 1816, kembali berkuasa di Indonesia. Pengembalian Indonesia pada dinilai oleh Tan Malaka (2008 : 51) sebagai upaya Inggris menjadikan sebagai opas yang mengawasi jalannya sistem perdagangan di Indonesia agar tetap menguntungkan Inggris yang saat itu berposisi sebagai pemegang kapital di Indonesia. Selanjutnya, di masa *cultuurstelsel* ini, utamanya kaum borjuis berupaya untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan tertentu seperti pembayaran hutang, dengan menggunakan cara ini (Soekarno, 2001 : 52). Selain itu, tanam paksa juga menjadi jalan pemerintah untuk mengisi kas yang kosong akibat peperangan yang melibatkan Tanam paksa atau *cultuurstelsel* mengeksploitasi Indonesia secara habis-habisan. Pemerintah memegang semua kendali, baik dalam proses penanaman, maupun distribusinya. Masyarakat Indonesia saat itu hanya berposisi sebagai tenaga dan pemilik tanah, namun pemerintah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah negara yang wajib digunakan sebagai lahan untuk sistem tanam paksa ini. Otomatis, masyarakat Indonesia hanya memiliki tenaga dan dijadikan pekerja terus-menerus oleh pemerintah.

Di Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Indonesia memasuki masa-masa pembangunan secara besar-besaran. Proyek pembangunan ini otomatis mendorong

pemerintah pusat untuk memperoleh banyak dana, beberapa cara ditempuh antara lain dengan memohon pinjaman pada IMF dan Bank Dunia serta membuka kesempatan bagi investor-investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Indonesia di era Soeharto seperti berada pada kondisi ekonomi liberal. Pada masa ini, kekuasaan dalam hal perdagangan terletak pada kelas pemilik perusahaan yang kuat (Robinson & Vedi, 2004 : 42). Pemerintah menggandeng investor luar negeri dengan harapan memberi devisa negara yang signifikan, yang nantinya juga akan membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia. Orang-orang kaya di masa Soeharto banyak bermunculan dan memainkan peranan penting dalam memunculkan perusahaan-perusahaan dan menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Mereka ini lah yang menjadi pemilik modal atau kapital di Indonesia. Kroini-kroni Soeharto juga disebut sebagai pemilik kapital di Indonesia saat itu (Robinson & Vedi, 2004). Sementara itu, rakyat Indonesia yang tidak memiliki cukup modal, akhirnya menjadi buruh di perusahaan-perusahaan atau pabrik yang ada dan berkembang saat itu. Era Soeharto memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi ekspatriat dan negara-negara lain untuk bermodal di Indonesia. Soeharto dan era Orde Barunya juga menjalankan rangkaian kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia serta dengan Amerika Serikat. Suatu hal yang berbeda dengan era Soekarno yang enggan menjalin kerjasama dengan AS.

Kelas menengah di Indonesia mulai terdefiniskan ketika Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto memberikan banyak fasilitas dan tempat kepada mereka hal ini untuk menopang jalannya roda pembangunan negara. Kelompok menengah ini terdiri dari para eksekutif muda yang

bekerja di pusat kota atau para lulusan sarjana yang memiliki gaya hidup metropolitan (Robinson, 1986). Pada era Orde Lama kelompok ini mungkin tidak banyak dibicarakan karena pada masa itu penuh dengan gejolak ideologi politik sedangkan pada era Soeharto mereka diberikan kemudahan posisi seperti menjadi tim penasihat pada pemerintahannya maupun dukungan fasilitas yang menunjang bagi kelompok ini seperti pembangunan kota lengkap dengan sarana prasarana yang bercirikan metropolitan dan global. Ruang gerak yang diberikan Orde Baru tersebut juga berupa pemberian lapangan kerja yang luas kepada para lulusan sarjana muda agar pertumbuhan perkotaan lebih dikedepankan dan dapat menjadi barometer bagi daerah di Indonesia. Konsep pembangunan yang sentralistis di kota besar inilah yang menyuburkan tumbuhnya kelas menengah perkotaan apalagi saat itu Indonesia mendapat keuntungan dari naiknya harga minyak dunia yang terkenal dengan periode boom oil pada tahun 1978.

Daya gerak kelompok menengah ini semakin kuat dan mampu menggalang dukungan dengan cepat dan besar dengan di dukung oleh semakin meningkatnya teknologi telekomunikasi dan informasi. Salah satu ciri dari kelas menengah perkotaan yaitu sering kumpul di kafe-kafe bermerk internasional, sering pergi ke mall, maupun ruang publik yang terkesan eksklusif di kawasan perkotaan, mereka lebih mengutamakan gaya hidup yang cenderung terkesan masyarakat perkotaan. Namun pada tahun 1998 kelompok menengah ini menjadi salah satu penopang bagi perubahan di Indonesia ketika mereka secara serentak menolak kepemimpinan Soeharto karena pemerintahannya yang tidak demokratis serta lebih mengedepankan kroni dan keluarganya

dalam memanfaatkan fasilitas negara. Kapitalisme semu di Asia Tenggara yang di ungkapkan oleh Yoshihara Kunio³,

³ Teori Kapitalisme Semu (Ezrat) Ekonomi menyatakan ada dua alasan kenapa ezrat kapitalisme terjadi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah campur tangan pemerintah yang tidak semestinya, Inggris pada abad ke-19 yang merupakan awal perkembangan liberalisasi ekonomi melalui revolusi industrinya mendapatkan jaminan dari negara mengenai kebebasan ekonomi. Negara hanyalah bersifat wasit atau komisioner yang memastikan jalan pasar agar tetap disiplin. Berbeda di Asia Tenggara, campur tangan dalam dunia perekonomian yang bersifat abstrak. Seperti yang dikatakan diatas bahwa kapitalisme yang terjadi di Asia Tenggara bukanlah kapitalisme tulen, karena kapitalisme bukanlah lahir dari persaingan-persaingan pengusaha local, melainkan perpindahan modal asing yang diinvestasikan kenegara tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa kapitalisme yang terjadi adalah kapitalisme perifikasi (yaitu negara-negara di Asia Tenggara merupakan satelit ekonomi negara kuat). Jadi bila Kritis rasionalkan Asia Tenggara tidaklah bergerak secara mandiri sama sekali industry dalam negerinya, melainkan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing negara tersebut. Hal ini menurut Yoshihara disebabkan oleh proses industrialisasi yang tidak disertai dengan peningkatan teknologi. Teknologi yang minim membuat tidak maksimalnya proses produksi, karena barang yang dihasilkan akan mempunyai daya saing yang rendah daripada yang dihasilkan oleh negara dengan teknologi yang lebih bagus. Namun teknologi itu sangatlah mahal dan bahkan tidak bisa dii, cara lain untuk peningkatan teknologi adalah dengan melakukan riset, namun cara ini juga memakan banyak waktu sedangkan kebutuhan akan suatu produk sudah sangat mendesak. Karena itulah satu-satunya cara adalah bekerjasama dengan perusahaan asing yang mempunyai teknologi serta menumpang kepada teknologi mereka. Tentu saja hal ini beralibat buruk terhadap suatu negara. Karena negara tersebut akan mengalami ketergantungan teknologi. Ini sangat berlainan dengan di Jepang dan Barat, yang banyak melakukan penelitian teknologi. Perusahaan yang selalu mengadakan modernisasi teknologi akan selalu satu langkah di depan pasar. Sedangkan yang terjadi di ASEAN sebaliknya: pasar yang memimpin industri. Ini mungkin karena banyak kapitalis ASEAN berasal dari kalangan dagang, yang sedikit perhatiannya terhadap perkembangan teknik perusahaannya. Ketergantungan teknologi ini menyebabkan kapitalisme ASEAN bergantung pada luar. Kurangnya sikap dan lingkungan masyarakat yang sedikit sekali perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan pada rasionalisme sendiri -- ikut menjadi akar perkembangan industri tanpa perkembangan teknologi ini. Pada 1970, di Muangthai dibentuk Kementerian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Energi. Tetapi ini lebih merupakan sesuatu di atas kertas daripada sesuatu yang sungguh-sungguh. Tidak lama

Berkembangnya industri di kota-kota metropolis di Asia Tenggara, terutama industri manufaktur

Orientasi kapitalisme semu, di Asia Tenggara banyak membicarakan tentang latar belakang sosial dan orientasi budaya para pemimpin perusahaan di Asia Tenggara, dan watak hubungan mereka.

Di era reformasi hingga sekarang, struktur kapital di Indonesia tidak banyak berubah. Para pemodal asing, keturunan Tionghoa, dan penduduk asli Indonesia yang memiliki kapital lebih, menjadi pemain dalam struktur kapital Indonesia. Sementara rakyat Indonesia sendiri yang tidak memiliki modal cukup tetap menjadi buruh bagi pabrik dan perusahaan yang dimiliki oleh tiga golongan tersebut. Perusahaan-perusahaan besar kini menguasai kapital di Indonesia. Pemerintah pun hanya berposisi sebagai pengawas dan pengatur, selebihnya perusahaan yang bertindak. Peranan perusahaan-perusahaan ini semakin besar. Tidak banyak berubah di era reformasi hingga sekarang, struktur kapital di Indonesia saat ini banyak dikuasai oleh aktor-aktor baru seperti perusahaan-perusahaan besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan matinya usaha-usaha dagang rakyat Indonesia yang berskala kecil.

Proses demokratisasi biasanya mengkaitkan dukungan kelas menengah dan civil society yang kuat dan mandiri. ini bahkan bersifat timbal-balik. Dengan

dukungan kelas menengah yang kokoh dan independen, civil society dapat mendorong proses demokratisasi secara lebih cepat. Sebaliknya, demokrasi yang semakin matang dapat memberikan umpan balik bagi kelas menengah dan civil society untuk membuat keduanya makin kuat dan kreatif. Kelas menengah menduduki posisi strategis bukan hanya karena ia menjadi " tulang punggung" dari civil society, tetapi terutama karena, menurut Daniel S Lev (1993), dibandingkan yang lainnya, kelas menengah cenderung konsisten mempromosikan perubahan. Bila perubahan adalah hal yang dititik-beratkan, maka tempat untuk mencarinya pertama kali adalah bukan pada kelas petani atau kelas bawah kota, karena ketertarikan mereka padanya tidak diimbangi dengan kekuatan yang cukup untuk bisa menjelmakannya. Secara historis, lanjut Daniel S Lev dalam kelas menengah telah menjadi sumber utama desakan terhadap perubahan ekonomi, sosial, kultural dan politik. Mereka telah menunjukkan kepedulian yang teguh dalam memperbaiki keadaan-keadaan yang mereka perjuangkan dan terlebih lagi memiliki prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan dan melanggengkan suatu perjuangan jangka panjang untuk itu. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia, di atas hampir-hampir tidak pernah terbukti. Kelas menengah sebagai tulang punggung civil society tidak pernah betul-betul berkembang dengan baik. Pada masa prakemerdekaan, kelas menengah pribumi tidak bisa bersaing dengan kelas menengah Tionghoa yang diberi hak-hak istimewa oleh dalam berbagai usaha perdagangan. Bisa dipahami jika pada awal kemerdekaan, kelas menengah yang muncul dan menjadi kuat bukanlah kelompok pribumi. Usaha untuk

kemudian orang menamakannya "kementerian makam". Dana dan fasilitas untuk kementerian tersebut sangat sedikit dan tidak berarti apa-apa. Di Filipina, anjuran Roger Posadar, Dekan Fakultas Sains di Universitas Filipina, supaya lebih memperhatikan penelitian, diabaikan oleh umum. Di Indonesia, B.J. Habibie dilihat Yoshihara sebagai satu-satunya orang yang mema ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ia sangat bersimpati ada usaha tersebut. Masyarakat harus diberi fantasi, katanya. Namun, diakuinya, hal itu kadang-kadang memang mahal.

mengangkat kelas menengah pribumi bukan tidak pernah dilakukan.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa struktur perekonomiannya tidak menguntungkan pembangunan nasional. Kelas menengah yang ada merupakan warisan dari zaman kolonial yang sepenuhnya dikuasai oleh penguasa dan pedagang serta beberapa bangsa Eropa lainnya di tingkat atas dan golongan Tionghoa di tingkat bawah. Struktur perekonomian itu oleh pemerintah Indonesia dengan penuh ambisi dan antusias ingin diubah guna menumbuhkan kelas menengah dari golongan pribumi. Usaha tersebut terutama jelas sekali terlihat sewaktu pemerintah melancarkan kebijakan ekonomi yang terkenal dengan sebutan Program Benteng pada awal tahun 1951. Dalam kerangka Program Benteng pemerintah Indonesia mengharapkan tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dari golongan "penduduk asli" yang harus menguasai sektor perdagangan dan industri, sementara pemerintah akan tetap menguasai cabang-cabang industri berat, dan modal asing diberi kesempatan "membantu" kegiatan golongan asli pada sektor industri yang "tidak penting". Namun sampai pertengahan kedua tahun 1950-an, ternyata yang tumbuh dan berkembang bukanlah kelas pengusaha asli yang kuat, dan akhirnya rencana pemerintah tersebut gagal total. Pertama hampir seluruh pengusaha yang mendapat kredit dan keistimewaan usaha perdagangan bukanlah yang memiliki keahlian berwiraswasta serta mempunyai jiwa entrepreneurship, tetapi hanya yang dekat atau mempunyai hubungan tertentu dengan penguasa. Akibatnya para pengusaha dan pedagang dalam arti kata sebenarnya terpental dan tidak mendapat kredit dari pemerintah,

hanya karena tidak mempunyai hubungan atau akses kepada kekuatan politik, baik lewat partai politik, aparat birokrasi maupun hubungan famili. Kedua, kegagalan pemerintah diperhebat dengan tumbuhnya pengusaha yang disebut "Ali-Baba". Pengusaha asli yang telah mendapatkan hak dan kredit dari pemerintah berusaha menjualnya kepada golongan Tionghoa. Pada era Orde Baru, kelas menengah menunjukkan perkembangan yang mengesankan berkat "keberhasilan" pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Munculnya pemerintahan Orde Baru merupakan titik balik dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang kemudian mempengaruhi perkembangan selanjutnya dari "golongan menengah" di negara Kritis, terutama dengan masuknya modal asing. Namun soal mandulnya kelas menengah selama ini tidak hanya karena adanya kooptasi kekuasaan, tetapi juga karena faktor budaya patrimonial yang masih begitu kuat. Itulah sebabnya, meski rezim Orde Baru sudah tumbang dan diganti rezim reformasi, kelas menengah sejauh ini belum menunjukkan kepeloporannya sebagai "agen perubahan" sebagaimana yang diharapkan. Keterlibatan kelas menengah dalam gerakan reformasi yang memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden pada bulan Mei 1998 lebih banyak berasal dari unsur-unsur civil society ketimbang kelas menengah dalam arti ekonomi. Kelas menengah dari unsur ini memang ikut menyuarakan perubahan, tetapi sudah sangat terlambat, yakni pada detik-detik terakhir kekuasaan Orde Baru di mana rezim ini sudah tidak mungkin lagi bertahan oleh gelombang arus tuntutan reformasi yang demikian massif.

Pembahasan

Meneliti dan mengkaji tentang Kapitalisme, Peran dan Konsumerisme pada kelas menengah bisa dilihat dan di analisis dari stratifikasi sosial dan pola dominasi Kapitalisme post-strukturalis, analisis kelas, hingga teori Kritis, Namun Kapitalisme, peran dan konsumerisme kelas menengah melihat dan fokus dengan perspektif Kritis dari pendekatan sosio historis kritis, kapitalisme di lihat dari kepemilikan pendapatan dan modal serta kemampuan golongan menengah dalam mengejar kepentingan ekonomi mereka dan melaksanakan transformasi kepemimpinan di bidang. Dengan pendekatan analisis struktur kelas untuk melihat peran, serta melihat aspek konsumerisme dilihat dari gaya hidup dalam proses konsumsi.

Konstruksi kapitalisme, peran dan konsumerisme yang tidak jelas dalam kelas menengah dapat dikaji lebih mendetail dan mendalam mengapa hal ini sampai muncul. struktur kapitalisme perifer yang ada di negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia tidak melahirkan kekuatan-kekuatan ekonomi dan kemasyarakatan seperti yang dikenal di Eropa, tetapi telah memunculkan kekuatan-kekuatan yang dimanifestasikan oleh kapitalisme negara, kapitalisme imperial (kapitalisme asing), dan *bureaucratic capitalism* dan *client capitalism*, yang mana menunjukkan bahwa golongan menengah Indonesia tidak mampu atau tidak bisa memiliki potensi ideologis dan politik seperti halnya kelas menengah di Eropa. Implikasinya adalah lahirnya kelas menengah yang menjadi *informal governance*. Contoh yang diungkapkan oleh Farchan⁴ ini dalam konteks Indonesia dapat

⁴ . Farchan Bulkin tidak hanya menjelaskan mengenai *socio-historis* perkembangan golongan menengah tetapi juga keterkaitannya dengan kapitalisme dan negara. Mengawali tulisanya, Farchan mengungkapkan bahwa studi politik Indonesia

dihadapkan kepada tantangan untuk mencerminkan suatu peta penjas dari saling hubungan yang rumit antara struktur sosial dan ekonomi, ideologi dan negara. Sehingga untuk mencari pendekatan tersebut, penjas terhadap saling hubungan yang dinamik antara negara dan masyarakat sipil dalam struktur masyarakat post-kolonial dapat digunakan tiga aliran pikiran itu menghasilkan tiga perspektif teoritis. Tiga perpektif tersebut, yaitu: *Pertama*, teori mengenai negara dalam masyarakat pinggiran, yang mengarahkan analisisnya pada konsekuensi dan implikasi adanya cara produksi kapitalisme pinggiran untuk memahami watak dan ciri negara, politik dan ideologi; *Kedua*, Konsep dan model rezim birokratik dan otoriter yang memusatkan perhatian pada transformasi politik akibat adanya ketegangan sosial dan politik yang disebabkan oleh proses industrialisasi pada tingkat elit maupun masyarakat luas; dan *Ketiga*, Statisme organik sebagai suatu model pemerintahan yang menangani masalah hubungan antara negara dan masyarakat dalam hubungannya dengan ideologi yang muncul sebagai penolakan dua sistem yang ada, kapitalisme dan sosialisme. Tiga proyek teoritis tersebut telah menangani tiga aspek penting hubungan antara negara dan masyarakat dalam struktur masyarakat pinggiran. Lalu siapakah yang dimaksud dengan golongan menengah? Golongan menengah yang dimaksudkan adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha dan pedagang pribumi, ahli hukum dan kelompok-kelompok. Kelahiran golongan menengah di Indonesia tidak dapat terlepas dari kebangkitan kelas menengah di Eropa yang telah memperkenalkan suatu tata susunan berpikir, masyarakat, ekonomi dan sosial baru yang tidak pernah dikenal seumnya, seperti dilahirkannya negara yang disahkan sebagai lembaga umum yang pada esensinya mempertahankan kelangsungan mekanisme kapitalisme, tempat kelas ini berpijak dan memperkuat dirinya. Menarik memahami hal tersebut, karena mencoba menunjukan bagaimana pembentukan negara oleh golongan menengah di Eropa tidak lain adalah sebagai upaya untuk melindungi kapitalis atau pemilik modal. Hal ini mendasarkan bahwa pembentukan negara hanyalah diperuntukan kepada segelintir orang yang menguasai sektor ekonomi. Ungkapan Farchan nampaknya memiliki korelasi dengan apa yang diungkapkan oleh David Harvey bahwa neoliberal yang didalamnya terkandung kapitalisme telah menjadi ide yang memungkinkan pasar bebas untuk mengambil alih peran pemerintah. Akan tetapi, intervensi pemerintah dalam perekonomian tetap digunakan hanya ketika hal itu akan menguntungkan para elit ekonomi, di mana intervensi pemerintah buruk jika itu akan melindungi tenaga kerja atau lingkungan, tetapi intervensi pemerintah baik jika itu akan membantu elit ekonomi. Keduanya berupaya menunjukkan bagaimana negara hanyalah alat yang

dilihat pada tulisan Syarif Hidayat, *Pilkada, Money Politics and The Dangers of Informal Governance Practices* yang menunjukkan bagaimana kaitannya dengan ancaman *informal governance* yang didominasi golongan menengah di tingkat lokal yang dikenal dengan istilah *shadow regims* yang memiliki karakter, aliansi para birokrat, pembisnis, militer dan preman. Sehingga yang terjadi adalah penguasaan sumber daya oleh pihak-pihak swasta dan aliansi politik tertentu tanpa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat karena lemahnya institusi formal pemerintah.

Sebetulnya apa yang menyebabkan golongan menengah begitu penting *Pertama*, kelompok ini baik di zaman kolonial maupun pasca-kolonial telah menjadi pusat-pusat masyarakat untuk berperan dalam kegiatan negara dan dalam mengartikulasikan serta merumuskan ideologi untuk masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, kelompok golongan menengah memiliki wawasan dan kesadaran pada kondisi yang diperlukan untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi mereka. *Ketiga*, golongan menengah adalah kelompok yang secara cepat dan kelihatan segera, betapa mereka dipengaruhi oleh kondisi-kondisi struktur sosial dan ekonomi, yang mendominasi Indonesia baik di zaman kolonial maupun pasca-kolonial. Namun, apakah semudah itu menggunakan negara untuk kepentingan ekonomi golongan menengah? Terutama dalam konteks Indonesia. Ternyata tidak demikian, menurut Farhan struktur kapitalisme periferan ternyata telah menghalangi secara keras usaha golongan menengah untuk memperkuat kedudukan

digunakan golongan menengah untuk melindungi kepentingannya dalam hal ekonomi.

ekonominya. Hal ini dikarenakan bahwa manifestasi struktur kapitalisme periferan ini adalah ketergantungan pendapatan negara pada impor dan ekspor dan akan mengalami dislokasi dan stagnansi jika hubungan dengan pusat diputuskan. Hal tersebut didasarkan pada karakteristik dari Kapitalisme periferan atau kapitalisme pinggiran sendiri, yaitu: *Pertama*, keuntungan yang ditarik dari penggabungan modal, tanah dan buruh tidak ditanam dalam ekonomi tuan-rumah, melainkan dalam "kapitalisme pusat" di negeri; *Kedua*, lembaga dan organisasi ekonomi kapitalis yang dipasang dari luar hanya akan berfungsi secara efektif kalau diintegrasikan ke dalam perekonomian kapitalisme pusat sebagai sumber modal. Dengan demikian kapitalisme pinggiran akan selalu menjadi kapitalisme yang tergantung (*dependent capitalism*). Pengertian kelas sejalan dengan pengertian lapisan tanpa harus membedakan dasar pelapisan masyarakat tersebut. Kelas Sosial atau Golongan sosial mempunyai arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan atas kriteria ekonomi. Jadi, definisi Kelas Sosial atau Golongan Sosial ialah: Sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Klasifikasi Kelas Sosial Pembagian Kelas Sosial terdiri atas 3 bagian yaitu: a. Berdasarkan Status Ekonomi. 1) Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan: – Golongan sangat kaya; – Golongan kaya dan; – Golongan miskin. Aristoteles menggambarkan ketiga kelas tersebut seperti piramida: Golongan pertama : merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan. Golongan kedua : merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka

terdiri dari para pedagang, dsbnya. Golongan ketiga : merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa. 2) Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yakni: a. Golongan kapitalis atau borjuis : adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi. b. Golongan menengah : terdiri dari para pegawai pemerintah. c. Golongan proletar : adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Termasuk didalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik.

Menurut Karl Marx golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian, dalam kenyataannya hanya terdapat dua golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau borjuis dan golongan proletar. 3) Pada masyarakat Amerika Serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi enam kelas yakni: a. Kelas sosial atas lapisan atas (Upper-upper class) b. Kelas sosial atas lapisan bawah (Lower-upper class) c. Kelas sosial menengah lapisan atas (Upper-middle class) d. Kelas sosial menengah lapisan bawah (Lower-middle class) e. Kelas sosial bawah lapisan atas (Upper lower class) f. Kelas sosial lapisan sosial bawah-lapisan bawah (Lower-lower class) Kelas sosial pertama : keluarga-keluarga yang telah lama kaya. Kelas sosial kedua : belum lama menjadi kaya Kelas sosial ketiga : pengusaha, kaum profesional Kelas sosial keempat : pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka Kelas sosial kelima : pekerja tetap (golongan pekerja) Kelas sosial keenam : para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, orang bergantung pada tunjangan. 4) Dalam masyarakat Eropa dikenal 4 kelas, yakni: 1. Kelas puncak (top class) 2. Kelas menengah

berpendidikan (academic middle class) Kelas menengah ekonomi (economic middle class) 3. Kelas pekerja (workmen dan Formensclass) 4. Kelas bawah (underdog class) b. Berdasarkan Status Sosial Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Dari sekian banyak kelas dalam struktur, yang akan di kaji adalah fokus pada pekerja kelas menengah dan berkerah putih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif post struktural dengan pendekatan sosio- historis kritis dengan analisis struktur kelas. Di masa-masa pasca perang, kapitalisme berhasil untuk mengatasi sebagian krisis fundamental sistem mereka melalui integrasi pasar dunia, menghasilkan satu pasar dunia yang satu dan berukuran raksasa. Ini menyediakan premis dasar bagi pasang-naik perekonomian yang dahsyat di tahun-tahun 1948-73, yang, pada gilirannya, membawa peningkatan hidup, setidaknya untuk seksi-seksi yang cukup besar ukurannya dalam masyarakat kapitalis di negeri-negeri kapitalis maju. Demikianlah, orang yang sekarat, seringkali mengalami ledakan energi yang besar, yang nampaknya merupakan awal pemulihan seutuhnya, tapi pada kenyataannya hanyalah satu prelude untuk kejatuhan baru yang lebih fatal.

Masa-masa seperti ini bukan hanya dimungkinkan, tapi niscaya, bahkan dalam epos kemunduran kapitalis, jika tatanan sosial yang ada tidak digulingkan. Namun demikian, pertunjukan pertumbuhan ekonomi yang meriah bak pesta kembang api itu, yang mencurahkan bertrilyun dolar selama beberapa dasawarsa, tidaklah dapat mengubah sifat dasar kapitalisme atau menghilangkan kontradiksi di dalamnya. Masa-masa panjang pasang-naik ekonomi dari 1948 sampai 1973 kini usai sudah. Tingkat pengangguran rendah,

meningkatnya stKritisrd hidup dan negara-kesejahteraan adalah bagian dari masa lalu. Sebagai ganti pertumbuhan Kritis kini menghadapi satu kemandegan ekonomi, resesi dan krisis kekuatan produktif. Kebobrokan pada perjuangan kelas pekerja, ditambah lagi dengan adanya mitos kelas menengah, dimana sebagian besar anggotanya terdiri dari kelas pekerja yang lebih tinggi atau lebih mapan jabatannya.

Potret pertama: Dari kacamata sosiologi (umum) menyedihkan karena makna yang ditangkap adalah masyarakat perkotaan di Indonesia memaknai hidup dengan mereduksinya sedemikian rupa dalam kegiatan-kegiatan yang konsumtif, bahkan maaf intelektualitas 'masyarakat perkotaan disetir oleh nafsu-nafsu konsumtif mereka yang dengan cerdas ditangkap oleh pebisnis yang senantiasa mengeluarkan produk-produk baru yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan yang dipajang dalam etalase-etalase indah di mall-mall di kota besar yang disusun sedemikian rupa sehingga nuansa-nuansa palsu pun dihadirkan seperti mall dengan gaya Eropa dsb (sekali lagi dunia simulasinya Jean Baudrillard). Betapa penyakit sosial masyarakat yang berakar pada konsumerisme begitu mengakar.

Potret kedua: Dari kacamata sebuah konsep sosio historis bahwa tentang common: mall merupakan sebuah mass private property yang merupakan properti pribadi/ kelompok (bukan publik) yang dibangun sedemikian rupa dengan fitur-fiturnya yang kemudian membuatnya 'terlihat' seperti ruang publik. Pemilik memegang hak untuk mengeksklusi orang luar dari properti ini walau dalam prakteknya terlihat sebagai sebuah ruang publik pada umumnya yang bisa diakses oleh semua warga (Seharing and Wood, 2003). Segregasi sosial dalam kota besar juga akan

terjadi karena pada dasarnya yang bekerja di mall-mall tersebut membutuhkan support sosial-ekonomi sesuai dengan gaji mereka (sebagai buruh pekerja) yang sejauh tahu tidak mencukupi untuk beradaptasi dengan gaya hidup mall dan tidak didukung oleh infrastruktur publik yang seyogyanya murah dan terjangkau (seperti transportasi), apa yang terjadi? Tidak heran di daerah-daerah seKritis mall, tumbuh ruang-ruang publik lain seperti pangkalan ojek, warung-warung tegal dsb, tersebut tidak dirancang, tapi logika sosial-ekonomi-politik yang neo-liberalistik menjadi faktor pendorong tumbuhnya segregasi sosial tersebut.

Potret ketiga: Dari kacamata analisis kelas: tersebut memperkuat segregasi kelas antara kelas pemodal dan kelas proletar / buruh (yang tidak semua terlihat seperti buruh yang mungkin selama ini Kritis bayangkan). Pekerja-pekerja di 'etalase-etalase mewah mall' tersebut adalah buruh-buruh yang menjual tenaga kerja mereka kepada korporasi, sementara buruh-buruh kerah putih lain menjadi konsumen setia dari korporasi-korporasi yang senantiasa membius dan mendorong konsumerisme dan menarik masyarakat untuk datang ke mall alih-alih menikmati taman-taman kota (yang masih ada), alih-alih untuk membicarakan kualitas hidup perkotaan dengan sesama warga lain dan mencoba berbuat (tidak berhenti pada bicara saja). Buruh kerah putih tersebut menjadi kelas menengah yang cukup sadar akan apa yang terjadi, tetapi ngnya berhenti dalam berwacana yang difasilitasi oleh 'Facebook', 'twitter' dsb.

Konstruksi dan Argumen ilmiah Charles Wright Mills dalam "The Imajinasi sosiologis dan Power Elit" sangat populer dan dari tulisan konstruksi kertas ini berfokus kemunculan kelas menengah dan elit pada setting masyarakat pasca Industrial.

Pendekatan ini diadopsi dalam rangka untuk menampilkan persimpangan antara biografi dan sosiologi dalam kehidupan dan karir Mills sebuah fitur yang ia membuat bagian sentral dari janji sosiologi. Makalah ini menggunakan pendekatan ini untuk merenungkan alasan mengapa *The Imajinasi Sosiologis* menjadi begitu populer dan mampu melampaui ketidakpopuleran umum Mills pada saat kematiannya dan sebagai bagian dari penjelasan mengapa pemberhentian buku tentang publikasi kontras dengan kontemporer memungkinkan untuk merefleksikan sukses untuk waktu yang berbeda secara signifikan dibandingkan pada penulisannya. Dengan imajinasi sosiologis seseorang dapat memahami historis yang lebih luas; dari segi pengertiannya terhadap hakikat kehidupan (inner life) dan kebutuhan kehidupan (external career) berbagai individu. Dengan menggunakan itu dia dapat melihat bagaimana individu-individu dalam keruwetan pengalaman sehari-harinya sering mengisruhkan posisi sosial mereka. Dalam keruwetan itu dicari kerangka masyarakat modern dan dalam kerangka demikian psikologi berbagai manusia dirumuskan. Dengan sarana-sarana itu kegelisahan pribadi para individu dipusatkan pada kesulitan-kesulitan eksplisit dan kesamaan-kesamaan publik diubah menjadi keterlibatan dengan isu public. Sedangkan Power Elite Kelompok elite adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada pada puncak strata memiliki kemampuan mengendalikan aktivitas perekonomian dan sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu kelompok kecil dalam masyarakat ini biasanya disegani dihormati kaya serta berkuasa. Lebih dari itu mereka adalah panutan sikap dan perilaku serta

senantiasa diharapkan dapat berbuat nyata bagi kepentingan bersama.

Di sisi lain kelompok yang dikuasai dan didominasi oleh elite disebut massa. Mereka adalah mayoritas inferior yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada di bawah tidak memiliki kemampuan mengendalikan baik dalam bidang ekonomi maupun politik serta tersingkirkan dalam proses pengambilan kebijaksanaan. Dalam kajian tentang elite bahwa masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar yaitu elite dan massa. Kelompok elite adalah minoritas berkuasa dan dominan di lain pihak massa adalah mayoritas dikuasai dan dormant. Dalam kajian ini terdapat dua pendekatan.

Pertama kelompok elite dianggap lahir dari proses yang alami. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang dikaruniai kepribadian kemampuan dan ketrampilan yang lebih. Dengan kata lain mereka adalah memiliki kapasitas personal yang lebih potensial dari pada massa. *Kedua* kelompok elite dianggap lahir dari akibat kompleksitas organisasi sosial terutama dalam menjawab tantangan heterogenitas masalah ekonomi dan politik.

Charles Wright Mills dilahirkan pada 28 Agustus 1916 di Waco Texas. Ayahnya pekerja kerah putih tepatnya sebagai perantara asuransi (a white collar insurance broker) sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Mills berasal dari keluarga kelas menengah (middle class) yang beragama Katolik Roma yang juga keturunan Inggris-Irlandia. Keluarganya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain di Texas tinggal di Waco Wichita Falls Fort Worth Sherman Dallas Austin dan San Antonio. Pekerjaan ayah Mills yang berpindah-pindah membuat Mills menjadi anak yang tumbuh dalam kesendirian dan jauh dari hubungan yang akrab. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi

Teknik Dallas tahun 1934 Mills berharap pada karier sebagai teknisi sehingga Mills masuk ke Perguruan Tinggi Mekanik dan Pertanian (Agricultural & Mechanical College) Texas sekolah militer yang besar tempat ayahnya berpikir akan membuat Mills "laki-laki. Setelah setahun di Perguruan Tinggi Mekanik dan Pertanian pada tahun 1935 Mills pindah ke Universitas Texas di Austin dengan mengambil jurusan Filsafat dan Sosiologi fakultas yang menyelenggarakan program doktor dari University Chicago dan juga president supportive dari Program Roosevelt (Roosevelt New Deal). Mills pun direkomendasikan oleh instruktur-instruktornya dan pindah ke Madison Wisconsin pada tahun 1939. Pada tahun 1945 Mills memiliki posisi sebagai research associate pada Biro Penelitian Sosial Terapan (Bureau of Applied Social Research) Columbia dan tahun berikutnya ia ditunjuk sebagai asisten profesor sosiologi pada Universitas Columbia. Otoritas yang dimiliki sebenarnya sebagai murid pra medis tetapi tahapan yang terjadi pada tahun 1951 dan 1952 membuatnya pindah ke Sosiologi.

Ada serangan oleh C. Wright Mills terhadap Parsons tahun 1959 dan ada kritik utama lain yang disusun oleh David Lockwood (1956) Alvin Gouldner (1959/1967/1970) dan Irving Horowitz (1962/1967). Pada 1950-an serangan ini terlihat seperti "serangan gerilya" tetapi ketika sosiologi memasuki tahun 1960-an dominasi fungsionalisme struktural jelas berada dalam bahaya. George Huaco (1986) mengaitkan pertumbuhan dan kemerosotan fungsionalisme struktural dengan posisi masyarakat Amerika dalam tatanan dunia. Ketika Amerika mencapai dominasi di dunia setelah tahun 1945 fungsionalisme struktural mencapai hegemoni dalam sosiologi. Fungsionalisme struktural

mendukung posisi dominan Amerika di dunia melalui dua cara. Pertama struktural-fungsional yang menyatakan bahwa setiap pola mempunyai konsekuensi yang berperan dalam pelestarian dan bertahannya sistem yang lebih luas tak lebih dari "sekadar merayakan kemenangan Amerika dan hegemoninya di dunia" (Huaco1986:52). Kedua teori struktural-fungsional yang menekankan pada keseimbangan (perubahan sosial yang terbaik adalah tak adanya perubahan) berkaitan erat dengan kepentingan Amerika kemudian berkaitan erat dengan kepentingan "kekaisaran terkaya dan terkuat di dunia". Kemerosotan dominasi Amerika di dunia pada 1970-an bertepatan benar dengan hilangnya posisi dominan fungsionalisme struktural di dalam teori sosiologi.

Mills menerbitkan dua karya utama yang mencerminkan politik radikalnya maupun kelemahannya dalam teori-teori Marxian. Pertama adalah *White Collar* (1951) berisi kritik tajam tentang status golongan pekerja yang sedang tumbuh yakni pekerja berkerah putih. Kedua adalah *The Power Elite* (1956) buku yang mencoba menunjukkan betapa Amerika didominasi oleh sekelompok kecil pengusaha politisi dan pimpinan tentara. Antara dua karyanya itu diterbitkan karya teoritisnya yang tercanggih *Character and Social Structure* (Gerth dan Mills 1953) ditulis bersama Hans Gerth (N. Gerth1993).

Radikalisme Mills menempatkannya di pinggiran sosiologi Amerika. Ia menjadi sasaran berbagai kritik dan ia sebaliknya menjadi pengkritik keras sosiologi. Sikap kritisnya memuncak dalam *The Sociological Imagination* (1959). Buku ini mengandung kritikan keras Mills terhadap Parsons dan terhadap praktik teori besarnya. Mills meninggal pada 1962 sebagai orang buangan dalam sosiologi. Tetapi sebelum

berakhirnya dekade 1960-an sosiolog radikal dan teoritis Marxian mulai melancarkan serangan penting ke dalam disiplin sosiologi.

Charles Wright Mills menekankan arti penting "imajinasi" dalam sosiologi. Hal ini yang pada akhirnya akan menjadi satu konsep yang dicetuskannya yaitu imajinasi sosiologis. Yang memungkinkan Kritis untuk menangkap hubungan antara sejarah dan biografi sehingga Kritis mempunyai kemampuan untuk melihat realitas secara mendalam atas kehidupan dalam konteks struktur sosial secara umum. Misalnya kemiskinan kebodohan atau frustrasi yang yang Kritis alami tidaklah seutuhnya kesalahan dari diri sendiri melainkan berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas. Mungkin hal ini pun berkaitan dengan sistem pemerintahan sosial dan ekonomi yang berlaku di suatu masyarakat. Dengan imajinasi sosiologis inilah Mills mencoba mengaplikasikannya dalam karya-karya atau studinya. Menurut Mills manusia sering tidak rasional karena hanya tanggap pada impuls slogan politik status simbol dan sebagainya. Dan tugas sosiologi adalah mengungkapkan hal-hal yang tidak rasional ini. Dalam konteks inilah Mills menulis berbagai macam karangan mengenai politik dan kekuasaan melakukan studi mengenai White Collar Workers dan menulis risalah tentang para pemegang kekuasaan. Studi tentang White Collar Workers (karyawan berkerah putih) di bangun di atas teori alienasi Marx. White Collar Workers adalah kelas menengah baru yang tidak diharapkan oleh produsen dan kelas pekerja upahan. Mereka terdiri dari para manajer buruh upahan salesman dan para pekerja kantor. Dan alienasi sendiri menurut Marx bersumber pada terpisahnya seseorang dari produk akhir karyanya.

Sebelum era industrialisasi pekerja menggunakan peralatan mereka sendiri

untuk menghasilkan suatu produk yang utuh seperti kursi atau meja. Sekarang para kapitalis telah mengambil alih kekuatannya (mesin) dan hanya menugaskan pada tiap pekerja satu atau dua langkah dalam seluruh proses produksi. Terbuang ke tugas yang berulang-ulang yang nampak jauh dari produk akhir para pekerja kehilangan rasa identitas dengan apa yang mereka hasilkan. Mereka menjadi terasing bukan hanya dari produk mereka tapi juga dari lingkungan kerja mereka. Dengan menggunakan imajinasi sosiologis White Collar Workers harus ditempatkan dalam masa sejarah disertai dengan pemahaman struktur sosial. Kemudian harus dilakukan usaha-usaha untuk menyatukan analisa psikologis dengan kerangka psikologis dengan kerangka sosiologis struktur sosial ini.

Sesuai dengan imajinasi sosiologis Mills menekankan bahwa White Collar Workers bahkan yang profesional biasanya tidak memiliki kekuatan pribadi untuk mengendalikan hidupnya sendiri dan kekuatan politik untuk membentuk bangsa.

Setelah membahas White Collar Worker Mills membahas tentang Power Elite (elit kekuasaan). Kekuasaan menurut Mills adalah kemampuan melaksanakan kehendak walaupun ada perlawanan. Dan kekuasaan terkonsentrasikan dari segelintir orang dimana analisisnya kontradiktif dengan ideologi dominan mengenai kesetaraan. Sedangkan elit kekuasaan adalah mereka yang mengambil keputusan-keputusan besar dalam masyarakat. Mills melihat elit kekuasaan sebagai suatu kelas sosial dari orang-orang yang memiliki asal usul dan pendidikan yang sama yang memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis yang menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe sosial yang serupa dan menjurus pada fakta kemudahan saling berbaur. Mills melakukan riset terhadap struktur kekuasaan

Amerika yang dari penelitian itu diperoleh suatu hubungan dominatif dimana struktur sosial dikuasi elit dan rakyat adalah pihak ada di bawah kontrol politisnya. Hubungan dominatif itu muncul karena elit-elit berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik. Elit-elit itu adalah militer politisi dan para pengusaha (ekonomi). Mills menemukan bahwa mereka para elit kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk kaya baik diperoleh melalui investasi atau duduk dalam posisi eksekutif. Satu hal penting lagi mereka yang termasuk dalam elit kekuasaan sering kali pindah dari satu bidang yang posisinya tinggi dalam bidang yang lain. Sebagian besar karyawan berkerah putih ini (white collar workers)⁵,

⁵ .Istilah yang digunakan Mills adalah sosok yang menyedihkan yang semakin kehilangan kekuatan pribadinya. Kesengsaraan ini oleh keterasingan mereka terhadap kerja maupun terhadap dirinya. Perubahan dalam kelas berkerah putih semenjak tahun 1900 pada umumnya menunjukkan keruntuhan posisi mereka. Kecenderungan itu termasuk : Hilangnya prestise bilamana dibanding dengan pengusaha tipe lama Merosotnya pendapatan riil "sampai hanya sedikit di atas dan dalam beberapa kasus penting lebih rendah ketimbang pendapatan rata-rata berbagai kelompok pekerja upahan" Mekanisasi jabatan yang mengancam eksistensi sekian lapangan kerja yang dipegang oleh karyawan yang berkerah putih Pembatasan otonomi pekerja kantor. Mills melihat kekuasaan sebagai kemampuan agar kehendak seseorang diikuti walaupun memperoleh perlawanan. Elit kekuasaan (power elite) adalah mereka berbeda jauh dengan kelas menengah yang berbeda dalam posisi sangat penting untuk mengambil

Konsepsi Mills ini didasarkan pada riset yang dilakukan pada tahun 1972 tentang pemimpin-pemimpin di seluruh sektor baik politik ekonomi sosial kultur dan institusi sipil di Amerika Serikat. Dari sini Mills menemukan bahwa kurang dari 250 orang yang menduduki posisi eksekutif legislatif dan yudikatif pemerintahan federal mengontrol seKritisr 40% perusahaan-perusahaan swasta dan 50% universitas. 200 orang perempuan dan lelaki mengontrol tiga perusahaan televisi dan sebagian besar perusahaan media cetak. Dari riset tersebut kemudian dapat ditarik garis besar bahwa sejumlah sedikit orang telah membuat keputusan-keputusan penting bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Mills mengategorisasikan tiga penguasa elite yaitu (a) pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk presiden anggota kabinet dan penasehat terdekat (b) pemilik-pemilik perusahaan besar dan pimpinan-pimpinannya (c) pimpinan-pimpinan lembaga militer.

Menurut Mills elit tersebut tidak menghambat kebebasan sipil sebaliknya mereka menghormati prinsip-prinsip hukum melakukan kerja dengan transparan dan mereka tidak bisa dikategorikan sebagai diktator. Kekuasaan elit tersebut datang dari beberapa sumber. Pertama adalah pos-pos pejabat penting dalam masyarakat. Posisi-posisi ini memberikan mereka pengaruh tidak saja dalam pemerintahan tetapi juga

keputusan dengan berbagai akibat besar. Mills melihat elit kekuasaan sebagai suatu kelas sosial dari orang-orang yang memiliki asal usul dan pendidikan yang sama yang memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis yang menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe sosial yang serupa dan menjurus pada fakta kemudahan saling berbaur.

bidang politik keuangan pendidikan sosial dan institusi lainnya. Mereka kemudian melakukan kolaborasi dengan organisasi-organisasi industri dan militer. Kedua Mills menyebut kepentingan bersama yaitu memkritisng pemerintah sebagai entitas yang seharusnya menjamin iklim yang kondusif bagi bisnis. Mereka menyepakati sistem pasar bebas kepemilikan swasta distribusi kekayaan yang tidak merata termasuk konsentrasi kekuasaan. Kerja-kerja sosial dari negara adalah tugas kedua. Mereka terkonsolidasikan lewat kultur-kultur elit seperti menyekolahkan anaknya ke sekolah elit pergi ke klub yang sama membaca media yang sama dan sebagainya.

Dengan demikian bila Amerika Serikat digambarkan melalui piramida maka level atas terdiri dari white house the state departement dan the pentagon serta sebagian senator ikut dilibatkan. Mereka hanya sebagai legitimasi belaka dibandingkan dengan pembuatan keputusan. Sedangkan di level dua oelh Mills ditempatkan di lingkaran luar elit mereka mengikuti pemilihan umum menempati jabatan-jabatan publik tetapi tidak membuat keputusan yang signifikan. Kepentingan yang mereka bawa hanyalah populisme personal yang di blow up media namun tidak kontributif terhadap isu-isu penting. Publik di Amerika juga tidak memegang peranan-peranan signifikan. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka dalam pemilihan umum yang semakin lama semakin kecil.

Teori elit Mills ini menyimpulkan kenapa terjadi public silence : pertama adalah dibuatnya agenda-agenda penting seperti kebijakan ekonomi dan keamanan nasional oleh kekuasaan para elit. Yang kedua adalah level tengah yang memegang peranan sedikit dan publik sama sekali dikunci. Termasuk demokrasi prosedural yang dijadikan legitimasi bagi pemerintahan

adalah salah satu bentuk nyata manifestasi yang menjadi monopoli kelas elite dimana kelompok-kelompok politik penguasa berkonspirasi degnan kelompok kapitalis merumuskan arah pembangunan. Pemilu dan mekanisme demokrasi hanyalah ritual monopoli kaum elit.

Mills menyatakan bahwa sudah umum walau keliru “menganggap bahwa elit kekuasaan itu tidak ada” dan dia mencoba menghilangkan dongeng gambaran suatu masyarakat di mana berbagai asosiasi sukarela dan publik yang klasik memegang kunci kekuasaan. kekuasaan yang pluralistis ini mengabaikan tingkat perbedaan kekuasaan yang terdapat dalam negara. Mills menggambarkan sisi perilaku manusia yang tidak rasional. Dengan mengungkapkan sifat tidak rasional ini Mills berharap beberapa orang akan diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Menurut Mills dalam keadaan Kritis memberi tanggapan yang tidak rasional terhadap berbagai simbol status dan slogan politik itu mungkin para pelaku dapat mengubah sejarah sosial mereka. Dengan demikian menurut Mills bilamana orang menyadari hakikat yang pada dasarnya tidak rasional itu mereka tidak akan bisa memperbaiki ditangan Kritis sendiri dan akhirnya mengubah masyarakat. Mills adalah orang yang sebagian besar telah ditentukan tergantung pada posisinya di dalam elit kekuasaan . Mills membolehkan tindakan kolektif di antara warga negara yang secara sosial sudah sadar untuk merintanggi gerakan kekuasaan elit dan menciptakan nasib peruntungan mereka. Radikalisme Mills menempatkannya pada posisi pinggiran dalam percaturan Sosiologi Amerika. Ia jadi sasaran begitu banyak kritik dan pada gilirannya ia menjadi kritikus utama Sosiologi. Sikap kritis ini memuncak dalam buku “The Sociological Imagination”. Yang perlu dicatat adalah kritik tajam Mills

terhadap Talcott Parsons dan praktik teori besar. Hibauan Mills terhadap “imajinasi sosiologis” adalah kritik terhadap model naturalistik yang sudah dominan dalam sosiologi kontemporer.

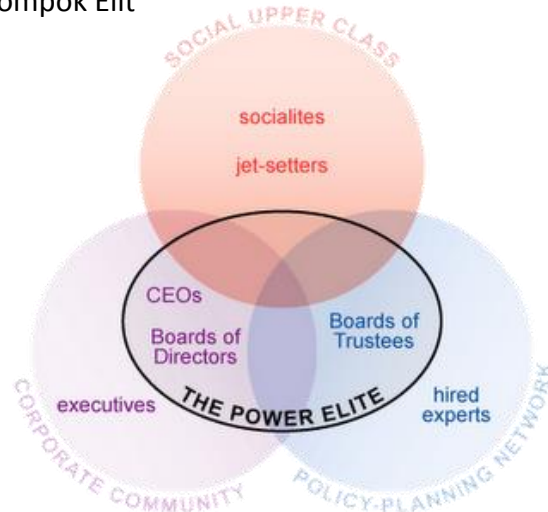
Imaginasi sosiologis adalah kemampuan untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat. Imaginasi sosiologis inilah yang coba digunakan Mills dalam karyanya. Teori tidak boleh abstrak seperti teori induk (grand theory) dengan sedikit atau tanpa data yang mendukungnya tidak pula merupakan empiris me abstrak dengan data tetapi dengan sedikit atau tidak ada teori yang relevan.

Kekuatan tritunggal :bisnis raksasa pemerintahan yang kuat dan militer yang tangguh. Tetapi ia menambahkan pada tekanan sosial psikologis ini dimensi sejarah dan kesadaran akan pengaruh kekuasaan terhadap struktur sosial. Kepercayaan terhadap kebebasan manusia untuk mengubah sejarah menyebabkan dia menuntut pembaharuan sosiologis yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagi Mills kemampuan sosiologi untuk mempengaruhi perubahan sosial tidak boleh mandul hanya gara-gara kekaguman terhadap model ilmu alam. Masyarakat Post-Industrial sendiri menjadi kelompok masyarakat yang mempengaruhi perubahan dalam proses industrialisasi. C. Wright Mills sebagai seorang ahli teori yang tak pernah

mengenyampingkan prinsip-prinsip psikologis mencoba mengkaitkannya dengan masalah sosiologis dan struktural. Masalah-masalah struktural juga membawanya ke analisa isu-isu sosial dan teori sosiologis terapan atau teori evaluasi. Sebagai seorang sosiolog berorientasi pembaharuan menunjukkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu bentuk fakta sosial. Wright Mills adalah salah seorang sosiolog Amerika yang berusaha menggabungkan perspektif konflik dengan kritik terhadap keteraturan sosial. Mills percaya bahwa masyarakat Amerika telah dibangun dalam sistem yang tidak bermoral. Dia sendiri tidak pernah mengikuti Pemilu karena dia menganggap partai-partai politik itu adalah penipu dan tidak rasional. Dia juga menyerang rekan-rekan kaum intelektual karena mengabaikan tanggung jawab sosialnya dan mengabdikan dirinya pada pengusaha padahal di belakang layar mereka mengatakan bahwa mereka itu bebas nilai.

Menurut Mills lingkungan kerja orang-orang yang terfragmentasi menyebabkan mereka tidak mengerti dengan sungguh-sungguh bagaimana masyarakat bekerja dan percaya bahwa pemerintah yang campur tangan akan menyebabkan rasa tidak aman dan nasib sial. Perkembangan struktur yang semakin tersentralisasi tanpa nilai-nilai tradisional yang tertinggal dengan orang-orang yang secara permanen cemas adalah sangat rapuh.

Gambar 1. Kekuasaan Kelompok Elit



Mills percaya bahwa kekuasaan bisa didasarkan atas faktor-faktor lain dan bukan pada hak milik semata-mata. Namun demikian kepentingan yang sama pada kelompok-kelompok elit itu telah mempersatukan mereka dan mempertahankan ekonomi perang secara umum bisa dikatakan bahwa Mills sependapat dengan sosiologi Marxis dan kelompok teori elit yang cenderung melihat masyarakat terbagi secara tajam antara kelompok yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. dia juga sependapat dengan Marxis dan Neo Marxis dalam hal mereka tentang alienasi efek dari struktur sosial terhadap kepribadian dan manipulasi manusia oleh media. Tulisan Mills bertujuan untuk diterapkan pada dan untuk menjelmakan perubahan. Mills menulis berbagai karangan mengenai politik dan kekuasaan melakukan studi mengenai white collar workers dan menulis risalah tentang para pemegang kekuasaan. Mills mengakui bahwa kelas menengah berkembang sebagai penunjang yang tidak diharapkan antara produsen dan kelas pekerja upahan. Sebagian besar karyawan berkerah putih ini (white collar workers) istilah yang digunakan Mills adalah sosok

yang menyedihkan yang semakin kehilangan kekuatan pribadinya. Kesengsaraan ini oleh keterasingan mereka terhadap kerja maupun terhadap dirinya. Perubahan dalam kelas berkerah putih semenjak tahun 1900 pada umumnya menunjukkan keruntuhan posisi mereka. Kecenderungan itu termasuk:

1. Hilangnya prestise bilamana dibanding dengan pengusaha tipe lama
2. Merosotnya pendapatan riil "sampai hanya sedikit di atas dan dalam beberapa kasus penting lebih rendah ketimbang pendapatan rata-rata berbagai kelompok pekerja upahan".
3. Mekanisasi jabatan yang mengancam eksistensi sekian lapangan kerja yang dipegang oleh karyawan yang berkerah putih
4. Pembatasan otonomi pekerja kantor.

Mills melihat kekuasaan sebagai kemampuan agar kehendak seseorang diikuti walaupun memperoleh perlawanan. Elit kekuasaan (power elite) adalah mereka berbeda jauh dengan kelas menengah yang berbeda dalam posisi sangat penting untuk mengambil keputusan dengan berbagai akibat besar. Mills melihat elit kekuasaan sebagai suatu kelas sosial dari orang-orang

yang memiliki asal usul dan pendidikan yang sama yang memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis yang menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe sosial yang serupa dan menjurus pada fakta kemudahan saling berbaur. Mills menyatakan bahwa sudah umum walau keliru "menganggap bahwa elit kekuasaan itu tidak ada" dan dia mencoba menghilangkan dongeng gambaran suatu masyarakat di mana berbagai asosiasi sukarela dan publik yang klasik memegang kunci kekuasaan. Kekuasaan yang pluralistis ini mengabaikan tingkat perbedaan kekuasaan yang terdapat dalam negara. Mills melihat kekuasaan sebagai kemampuan agar kehendak seseorang diikuti walaupun memperoleh perlawanan. Elit kekuasaan (power elite) adalah mereka berbeda jauh dengan kelas menengah yang berbeda dalam posisi sangat penting untuk mengambil keputusan dengan berbagai akibat besar. Mills melihat elit kekuasaan sebagai suatu kelas sosial dari orang-orang yang memiliki asal usul dan pendidikan yang sama, yang memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis yang menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka adalah tipe sosial yang serupa dan menjurus pada fakta kemudahan saling berbaur. Mills menyatakan bahwa sudah umum walau keliru, "menganggap bahwa elit kekuasaan itu tidak ada", dan dia mencoba menghilangkan dongeng gambaran suatu masyarakat di mana berbagai asosiasi sukarela dan publik yang klasik memegang kunci kekuasaan. kekuasaan yang pluralistis ini mengabaikan tingkat perbedaan kekuasaan yang terdapat dalam negara. Mills menggambarkan sisi perilaku manusia yang tidak rasional. Dengan mengungkapkan sifat tidak rasional ini, Mills berharap beberapa orang akan diarahkan untuk mengubah struktur sosial. Menurut Mills dalam keadaan Kritis memberi tanggapan

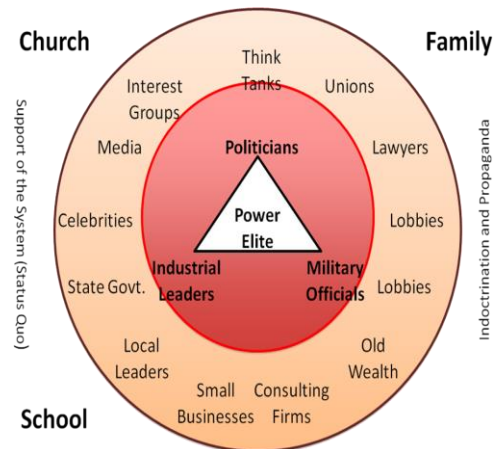
yang tidak rasional terhadap berbagai simbol status dan slogan politik itu, mungkin para pelaku dapat mengubah sejarah sosial mereka. Dengan demikian menurut Mills bilamana orang menyadari hakikat yang pada dasarnya tidak rasional itu, mereka tidak akan bisa memperbaiki sendiri dan akhirnya mengubah masyarakat. Mills adalah orang yang sebagian besar telah ditentukan, tergantung pada posisinya di dalam elit kekuasaan. Mills membolehkan tindakan kolektif, di antara warga negara yang secara sosial sudah sadar untuk merintanggi gerakan kekuasaan elit dan menciptakan nasib peruntungan mereka. Radikalisme Mills menempatkannya pada posisi pinggiran dalam percaturan Sosiologi Amerika. Ia jadi sasaran begitu banyak kritik, dan pada gilirannya ia menjadi kritikus utama Sosiologi. Sikap kritis ini memuncak dalam buku "The Sociological Imagination". Yang perlu dicatat adalah kritik tajam Mills terhadap Talcott Parsons dan praktik teori besar. Himbauan Mills terhadap "imajinasi sosiologis" adalah kritik terhadap model naturalistis yang sudah dominan dalam sosiologi kontemporer.

Imaginasi sosiologis adalah kemampuan untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat. Imaginasi sosiologis inilah yang coba digunakan Mills dalam karyanya. Teori tidak boleh abstrak, seperti teori induk (grand theory) dengan sedikit atau tanpa data yang mendukungnya tidak pula merupakan empiris me abstrak dengan data tetapi dengan sedikit atau tidak ada teori yang relevan.

Kekuatan tritunggal :bisnis raksasa, pemerintahan yang kuat dan militer yang tangguh. Tetapi ia menambahkan pada tekanan sosial psikologis ini dimensi sejarah dan kesadaran akan pengaruh kekuasaan terhadap struktur sosial. Kepercayaan

terhadap kebebasan manusia untuk mengubah sejarah, menyebabkan dia menuntut pembaharuan sosiologis yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagi Mills

kemampuan sosiologi untuk mempengaruhi perubahan sosial tidak boleh mandul hanya gara-gara kekaguman terhadap model ilmu alam.



Preposisi

Dalam Penelitian ini mencoba menghasilkan suatu preposisi yang mengacu pada state of the art dalam bidang Stratifikasi Sosial dengan pendekatan metode fenomenologi dalam sebuah peran penyadaran kritis kelas menengah yang terdominasi dalam masyarakat perkotaan, serta dapat menemukan menganalisis peran kelompok menengah dalam bingkai stratifikasi sosial, focus dari rencana proposal disertasi ini adalah melihat dan menemukan implikasi teoritik dampak proses industrialisasi dan transformasi struktural memunculkan kelompok menengah di perkotaa di kota Jawa Timur serta kelompok menengah dalam lingkungan industrialisasi yang tidak konsumtif saja tetapi juga kelompok menengah yang mampu mandiri dan membuka lapangan pekerjaan baru (enterpreunership). Riset kritis harus melakukan kritik ideologi berdasarkan perbandingan antara struktur sosial buatan dengan struktur sosial nyata. Riset kritis menentang proses-proses sosial

yang tidak manusiawi dan selanjutnya proses-proses yang tidak manusiawi tersebut dapat dipecahkan melalui aksi bersama antara peneliti dengan rakyat

Riset kritis demikian dapat diterapkan pada beberapa jenjang analisis mulai dari tingkat lokal sampai dengan pergolakan-pergolakan ideologi dan politik global. Meskipun demikian pada seksi ini pusat perhatian lebih ditujukan pada pergolakan kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan lokal karena gejala tersebut merupakan gejala dominan saat ini. Ini tidak menutup kemungkinan, seperti dikatakan diatas, bahwa metode ini dapat diterapkan pada jenjang analisis suatu sistim sosial (Nasional) atau global (internasional). Biasanya gerakan ini dilakukan melalui empat tahap utama yakni : Interpretasi, analisis empiris, dialog kritis, dan dilanjutkan dengan aksi. Metode ini digunakan oleh Marx untuk mengkritik kapitalisme liberal. Kritik-kritik terhadap kapitalisme modern dengan demikian harus mengkombinasikan antara analisis struktural dengan kritik-kritik

ideologi kontemporer. Hanya melalui cara ini analisis radikal dapat mendorong munculnya aksi revolusioner.

Industrialisasi bertujuan menjadikan sektor industri yang mantap, kuat dan stabil melalui usaha terpadu yang melibatkan seluruh rakyat dengan berlandaskan azas demokrasi ekonomi, pemerataan dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Khusus dalam dunia ekonomi, arus utama dari sistem nilai atau paradigma yang mendominasi sebagai dasar operasional berjalannya aktifitas ekonomi global adalah dua aliran tersebut. Sistem ekonomi dengan segala macam derivasi, modifikasi dan cabang-cabangnya adalah fenomena sosial yang berada dalam koridor liberalisme vis a vis sosialisme. Sepanjang sejarahnya, kedua sistem ekonomi di atas, masing-masing berusaha untuk mendominasi dunia. Baik liberalisme maupun komunisme oleh para pengagumnya dipercayai sebagai "mantera" atau "agama" yang paling tepat untuk membangun dunia. Kedua aliran tersebut mempunyai yang di dalamnya masing-masing menawarkan mimpi-mimpi kesejahteraan dan kemakmuran. Hanya saja tipe dan dasar operasionalnya berbeda. Bagi liberalisme, untuk menciptakan kemakmuran, maka sebagai prasyaratnya harus diciptakan ruang kebebasan bagi para individu untuk menentukan dan mengejar kepentingan ekonomi.

Sehingga konsekuensinya, bagi mereka yang kuat yang berhak memenangkan pertarungan. Sementara bagi mereka yang lemah, harus bersedia menyingkir dari percaturan ekonomi-politik dunia. Pertarungan ternyata, sekarang dimenangkan oleh kubu liberal-kapitalis. Maka, muncullah yang namanya sistem kelas. Dalam sistem ini, negara, regulasi, sistem perundang-undangan dilarang keras untuk melakukan intervensi, melainkan harus membuka jalan seluas-luasnya demi terimplementasinya sistem tersebut. Sebaliknya, traktat ekonomi sosialis percaya bahwa untuk menciptakan kemakmuran, maka segala potensi alam harus dibagi sama rata, sama rasa. Individu tidak mempunyai kebebasan untuk memiliki atau apalagi mengakumulasi modal.

Salah satu teori yang mengintegrasikan agen-struktur adalah teori strukturasi yang berusaha mencari "jalan tengah" mengenai dualisme yang menggejala dalam ilmu-ilmu sosial. Ada dua pendekatan yang kontras bertentangan, dalam memkritisng realitas sosial. Pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial (seperti, fungsionalisme struktural, yang cenderung ke obyektivisme). Kedua, pendekatan yang terlalu menekankan pada individu (seperti, interaksionisme simbolik, yang cenderung ke subyektivisme).

Daftar Pustaka

- , *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Cet. ke-2, Jakarta: KPG, 2003
- Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method*, London: MacMillan Press, 1976
- , *The Constitution of Society*, Berkley: University of California Press, 1984
- , *Modernity and Self-Identity*, Cambridge: Polity Press, 1990
- , *The Transformation of Intimacy*, Cambridge: Polity Press, 1992
- , *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1998
- Amir, Fahrrozzi, Kelas Menengah Yang Pragmatis Survei Litbang Kompas, Desember 21, 2011
- Asian Development Bank, Survei tentang, Emerging Of Middle Class Indonesia, 2012
- Bank Dunia, Hasil Research, Global Development Horizons, Multipolarity: The New Global Economy menempatkan Indonesia, Brasil, China, India, Korea Selatan, dan Rusia sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dunia hingga 2025 mendatang, 2011
- Bulkin, Farchan. *Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian*. Dimuat dalam Prisma, no. 2, Februari, 1984.
- Bulkin, Farchan *Pokok-Pokok Pikiran Kelas Menengah: Makalah untuk PAIS (Percakapan Ahli Ilmu-Ilmu Sosial)*, 3-4 Oktober 1984.
- Buttomore, TB, *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tanjung Institue, Jakarta 2006.
- Bell, Daniel Neil, *The coming of Post-Industrial Society (Venture Social Forecasting)*, New York Published Society, 1973.
- Conway, Dennis dan Jeffery H. Cohen, "Consequences of Migration and Remittances for Mexican Transnational Communities," *Economic Geography* 74 (1), 1998: 26-44
- Elliot, Phillip, *Intellectuals in the Information society and the disappearance of the Public Sphere*. In Boyd Barttet, Oliver and Newbold, Chris. Eds (1995), *Approach to Media Reader*, New York; Arnold.
- Featherstone, Mike, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008
- Graham, Nicholas, *The Media and The Public Sphere*. In Boyd Barttet, Oliver and Newbold, George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai dengan Perkembangan Teori Sosial Post-Modern*, Kreasi Wacana, Bantul, 2011
- Giddens, Antony, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, London: MacMillan Press, 1979
- Giddens, Antony, *Constitution of Societ, Teori Strukturasi dan Agensi, Penerbit Pedati, PAsuruan, 2003.*

- Habermas, J, 1989, *Institution of the Public Sphere*. In Boyd Barrett, Oliver and Hardiman, F. Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu Masyarakat dan Posmodern menurut Jurgen Habermas*, (1993), Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Harvey, David. *The Brief History of Neo-liberalism*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Hadi, Jaya, 1999, *Kelas menengah Bukan Ratu Adil*, PT. Tiara Wacana, Kopen Yogyakarta
- Heriyanto, Ariel, 1996, *Politik Kelas Menengah*, Yayasan LP3ES, Jakarta
- Hidayat, Syarif. *Pilkada, Money Politics and The Dangers of Informal Governance Practices*, hlm. 125-143.
- Haralambos dan Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives*, Cet. ke-5, London: Hapercollins, 2000
- Paper Review, *Middle Class Size in the Past, Present, and Future: A Description of Trends in Asia*, 2013
- Mills, Wright, C, *Sociological Imagination*, Oxford Press, Fourteen Edition, 1962,
- Mills, Wright, C, *The Power Of Elite*, Oxford Press, New Edition, 1956,
- Nielsen, Ac, *Survei Tentang Masyarakat di Indonesia Konsumerisme di Jakarta*, 2009
- Newbold, Chris. Eds (1995), *Approach to Media Reader*, New York; Arnold.
- Neuwman Lawrence.W, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT Indeks Jakarta, 2013.
- Priyono, B. Herry, "Sebuah Terobosan Teoritis," *Basis*, No.1-2, Tahun ke-49, Januari-Februari 2000
- Prisma, Volume 31, *Kelas Menengah Di Indonesia Apa Yang Baru*, Yayasan LP3ES, Jakarta, 2012,
- Setiawan, Bambang, *Kelas Mengah Menggantung Asa Pada Negar sebuah Survei Litbang Kompas*, Edisi Jumat, 8 Juni 2012
- Senjaja, S. Djuarsa dan Ashadi Siregar, *Kumpulan Makalah Seminar Televisi Publik*, Yogyakarta: UGM, 2001.
- Stevensen, Nick, *Understanding Media Cultures, Social Theory and Mass Communication*, 1995 sage Publication, London.
- John Hartley, *Communication, Cultural, & Media Studies: Konsep Kunci*, Jalasutra, Yogyakarta, 2011.
- Veblen, Thorne, *The Teory Of Leisure Class*, Unwin Books Of London, 1970
- Yuswohady, *Middle Class Muslim*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014